

## Memahami Sejarah Bangsa Dalam Politik Diplomasi Indonesia – Belanda

Herdian Tria Wulan Sari<sup>1</sup>, Dini Andreswari Prianbudi<sup>2</sup>, Nursalim<sup>3</sup>, Agus  
Budianto<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri  
Email: [1herdiantriaws@gmail.com](mailto:1herdiantriaws@gmail.com), [2diniandreswari20@gmail.com](mailto:2diniandreswari20@gmail.com),  
[3nursalim@unpkediri.ac.id](mailto:3nursalim@unpkediri.ac.id), [4budianto@unpkediri.ac.id](mailto:4budianto@unpkediri.ac.id)

### *Abstract*

*This article examines the historical context of Indonesian-Dutch diplomatic relations, focusing on the role of historical understanding in shaping current diplomatic practices. It argues that a nuanced understanding of shared history, including conflicts and collaborations, is crucial for promoting constructive and mutually beneficial relationships. This article analyzes key historical events, including the Dutch colonial period, the Indonesian struggle for independence, and post-independence relations. It highlights the importance of reconciliation, dialogue, and a commitment to shared values for building a more robust and sustainable future for both nations.*

**Keywords:** *Indonesia-Dutch relations, diplomacy, history, historical understanding, reconciliation.*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas konteks historis hubungan diplomatik Indonesia-Belanda, dengan fokus pada peran pemahaman sejarah dalam membentuk praktik diplomasi terkini. Artikel ini berpendapat bahwa pemahaman yang nuanced terhadap sejarah bersama, termasuk konflik dan kolaborasi, sangat penting untuk mendorong hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan. Artikel ini menganalisis peristiwa sejarah kunci, termasuk periode kolonial Belanda, perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan, dan hubungan pasca-kemerdekaan. Artikel ini menyoroti pentingnya rekonsiliasi, dialog, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan bagi kedua negara.

**Kata Kunci:** Hubungan Indonesia-Belanda, diplomasi, sejarah, pemahaman sejarah, rekonsiliasi.

## A. PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda merupakan sebuah cermin dari sejarah yang panjang dan berliku, mencakup lebih dari tiga abad interaksi yang melibatkan kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan upaya rekonsiliasi pasca-kemerdekaan. Sejarah panjang ini tidak hanya mencakup masa penjajahan Belanda yang dimulai pada abad ke-17, tetapi juga perjuangan heroik bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan pada pertengahan abad ke-20, serta dinamika hubungan bilateral yang terus berkembang hingga hari ini (Khaldun, 2021).

Pada masa kolonial, Belanda menguasai Indonesia dan mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan sosial (Aditya et al., 2024). Eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap rakyat Indonesia meninggalkan jejak luka yang mendalam dalam sejarah bangsa. Periode ini diwarnai oleh ketidakadilan dan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, namun juga menjadi landasan bagi tumbuhnya semangat nasionalisme dan perlawanan.

Masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang memuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, merupakan babak penting yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan diplomatik Indonesia-Belanda. Proses panjang yang melibatkan diplomasi, konflik bersenjata, dan perundingan internasional ini menguji ketangguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk meraih kebebasan. Peran internasional dan dukungan dari negara-negara lain juga menjadi faktor kunci dalam pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949.

Pasca-kemerdekaan, hubungan Indonesia-Belanda mengalami pasang surut, dipengaruhi oleh berbagai peristiwa global dan domestik. Upaya untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat masa kolonial membutuhkan waktu dan pendekatan diplomatik yang cermat. Kedua negara telah melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki hubungan, termasuk kerja sama ekonomi, pendidikan, dan budaya. Meski demikian, isu-isu sejarah masih sering kali menjadi sumber ketegangan, mengingat luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh.

Pemahaman mendalam mengenai sejarah bangsa sangat penting dalam membentuk pendekatan diplomatik yang efektif dan berkelanjutan. Sejarah bukan hanya sekadar rangkaian peristiwa masa lalu, tetapi juga sebuah fondasi yang membentuk pola pikir, persepsi, dan tindakan diplomatik di masa kini dan masa depan (Liliwari, 2019). Dengan mempelajari dan menghargai sejarah, kedua negara dapat menemukan cara untuk menjalin hubungan yang lebih konstruktif dan saling menguntungkan. Pemahaman ini membantu menghindari kesalahan masa lalu dan mendorong dialog yang lebih terbuka serta kerja sama yang lebih erat.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sejarah bangsa Indonesia-Belanda memengaruhi politik diplomasi kedua negara. Dengan membahas secara mendalam periode kolonial Belanda di Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta hubungan pasca-kemerdekaan, artikel ini berharap dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana pemahaman sejarah dapat menjadi alat penting dalam membangun hubungan bilateral yang lebih baik di masa depan. Memahami dinamika sejarah ini bukan hanya penting bagi para diplomat dan pemimpin politik, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam rangka membangun kesadaran kolektif yang lebih mendalam tentang hubungan Indonesia-Belanda.

## B. KAJIAN TEORI

Pemahaman sejarah memainkan peran krusial dalam politik diplomasi (Azra et al., 2024), terutama dalam konteks hubungan bilateral yang kompleks seperti antara Indonesia dan Belanda. Dalam analisis hubungan ini, beberapa teori relevan yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana sejarah memengaruhi dinamika hubungan diplomatik antara kedua negara, antara lain Teori Realpolitik, Teori Konstruktivisme, dan Teori Historisisme. Masing-masing teori ini menawarkan perspektif yang unik tentang bagaimana sejarah dapat menjadi alat yang penting dalam politik internasional.

### 1. Teori Realpolitik

Teori Realpolitik menekankan bahwa hubungan internasional didorong oleh kepentingan nasional dan kekuasaan (Rosyidin, 2016; Carlsnaes et al., 2021). Dalam konteks ini, sejarah dilihat sebagai alat untuk mencapai dan memelihara kepentingan nasional. Pada masa kolonial, Belanda mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan kolonial di dunia. Dalam periode pasca-kemerdekaan, pendekatan realpolitik ini dapat dilihat dalam upaya diplomatik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional dan memperkuat kedaulatannya. Hubungan antara Indonesia dan Belanda sering kali ditentukan oleh kepentingan nasional masing-masing, baik dalam bentuk konflik maupun kolaborasi. Dengan memahami sejarah dalam kerangka realpolitik, kita dapat melihat bagaimana kedua negara menggunakan peristiwa masa lalu untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi diplomatik dan kerja sama internasional.

### 2. Teori Konstruktivisme

Teori Konstruktivisme menekankan peran ide, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor internasional. Menurut konstruktivisme, sejarah bukan hanya rangkaian fakta, tetapi juga konstruksi sosial yang memengaruhi identitas nasional dan cara negara memandang satu sama lain (Bilad & Zakarias, 2012). Dalam konteks Indonesia dan Belanda, sejarah kolonialisme membentuk identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang berjuang melawan penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan. Identitas ini memengaruhi cara Indonesia berinteraksi dengan Belanda, sering kali dengan memori kolektif yang masih menyimpan luka masa lalu. Di sisi lain, Belanda juga membentuk identitas nasionalnya melalui interaksi kolonial dengan Indonesia, yang memengaruhi cara Belanda memandang tanggung jawab dan hubungan dengan bekas koloninya. Dengan memahami sejarah sebagai konstruksi sosial, kita dapat melihat bagaimana narasi sejarah membentuk persepsi dan tindakan diplomatik kedua negara.

### 3. Teori Historisisme

Teori Historisisme menekankan pentingnya sejarah dalam memahami perilaku manusia dan masyarakat (Taum, 2020; Alkhaerat et al., 2024). Dalam konteks hubungan internasional, historisisme melihat sejarah sebagai sumber pembelajaran yang berharga untuk memahami pola interaksi antar negara dan memprediksi kemungkinan konflik atau kolaborasi di masa depan. Hubungan antara Indonesia dan Belanda, yang telah melalui berbagai fase dari kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, hingga hubungan pasca-kemerdekaan, memberikan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana kedua negara dapat berinteraksi di masa depan. Dengan memahami sejarah sebagai panduan, diplomat dan pemimpin politik dapat mengidentifikasi pola-pola yang berulang dan menghindari kesalahan masa lalu. Historisisme mengajarkan bahwa

dengan belajar dari sejarah, negara dapat membangun hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan.

Dalam keseluruhan analisis, ketiga teori ini—Realpolitik, Konstruktivisme, dan Historisisme—menawarkan cara yang berbeda namun saling melengkapi untuk memahami bagaimana sejarah memengaruhi politik diplomasi antara Indonesia dan Belanda. Dengan menggunakan kerangka teori ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika hubungan bilateral kedua negara dan bagaimana sejarah dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan memanfaatkannya untuk membentuk hubungan internasional di masa kini dan masa depan.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik studi literatur yang diperoleh dari data artikel, buku, dan website yang dianalisis secara menyeluruh (Sari & Wiranata, 2024). Data dianalisis secara deskriptif untuk memahami bagaimana sejarah memengaruhi politik diplomasi Indonesia-Belanda.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang ada melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Data yang dihasilkan berupa kata-kata dan deskripsi yang mendalam mengenai objek penelitian. Teknik yang digunakan adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi seperti artikel, buku, dan dokumen terkait. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara mendalami konteks sejarah dan politik yang ada, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda, serta faktor-faktor sejarah yang memengaruhi hubungan tersebut.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **Periode Kolonial Belanda**

##### **1. Sejarah Kolonial Belanda di Indonesia**

Kedatangan Belanda di Indonesia dimulai pada tahun 1596 ketika Cornelis de Houtman mendarat di Banten (Rochjati & Putri, 2019). Tujuan awal mereka adalah untuk berdagang, terutama dalam rempah-rempah yang sangat berharga pada saat itu. Namun, interaksi awal ini tidak berjalan mulus, dan Belanda sempat mengalami penolakan dari penduduk lokal.

Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) untuk mengelola perdagangan di Asia (Pamungkas, 2014). VOC menjadi kekuatan dominan di Nusantara dan mendirikan pos-pos perdagangan, termasuk Batavia (sekarang Jakarta) yang dijadikan sebagai pusat administratif dan komersial. Dengan kekuasaan ini, VOC melakukan monopoli perdagangan dan menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Mataram dan Banten.

Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799 karena mengalami kebangkrutan (Santoso, 2014), pemerintah Belanda mengambil alih kendali langsung atas wilayah

tersebut, yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Pada abad ke-19, Belanda memperluas wilayah kekuasaannya melalui berbagai ekspansi militer dan diplomasi, meskipun banyak perlawanan dari penduduk setempat.

Pemerintahan kolonial Belanda menerapkan sistem administrasi yang kompleks (Nuralia, 2017), termasuk pembagian wilayah menjadi distrik yang dikelola oleh pegawai negeri sipil Eropa. Kebijakan ini sering kali mengabaikan hak-hak dan kesejahteraan penduduk lokal, yang menyebabkan ketidakpuasan dan perlawanan di berbagai daerah. Selama masa kolonial, pendidikan diperluas, tetapi hanya untuk segelintir orang Indonesia yang dianggap beruntung. Bahasa Belanda tidak menjadi bahasa resmi di kalangan penduduk lokal, meskipun beberapa istilah Belanda masuk ke dalam bahasa Indonesia.

Kolonialisme Belanda di Indonesia berakhir setelah Perang Dunia II (Imam, 2024), ketika Jepang menduduki Hindia Belanda dari tahun 1942 hingga 1945. Setelah Jepang menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, yang menandai berakhirnya lebih dari tiga abad penjajahan Belanda.

## 2. Dampak Kolonialisme terhadap Masyarakat Indonesia

Kolonialisme Belanda membawa dampak yang mendalam terhadap masyarakat Indonesia:

- a. **Ekonomi:** Aditya (2024) mengatakan kolonialisme Belanda mengubah struktur ekonomi Indonesia menjadi sangat terfokus pada kepentingan kolonial. Belanda menerapkan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) pada awal abad ke-19, yang memaksa petani untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi dan gula. Sistem ini tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi juga tenaga kerja lokal, yang sering kali bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan tanpa imbalan yang layak. Penelitian menunjukkan bahwa daerah-daerah yang terdampak oleh sistem ini, seperti yang memiliki pabrik gula, masih menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi hingga hari ini, meskipun dampak jangka panjangnya tetap merugikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
- b. **Sosial:** Dari segi sosial, Fakhriansyah & Patoni, (2019) menyebutkan kolonialisme Belanda menciptakan stratifikasi kelas yang jelas antara orang Eropa dan pribumi. Masyarakat pribumi sering kali diperlakukan sebagai warga kelas dua, dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Hanya segmen tertentu dari populasi yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang mengakibatkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam masyarakat. Penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi kesehatan masyarakat, termasuk tingkat kematian, sangat dipengaruhi oleh sistem kerja paksa yang diterapkan selama periode kolonial.
- c. **Politik:** Politik kolonial Belanda memperkenalkan sistem administrasi yang mengubah struktur pemerintahan local (Salma et al., 2023). Belanda sering kali mengabaikan sistem tradisional yang ada dan menggantinya dengan hukum dan administrasi yang sesuai dengan kepentingan mereka. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa hak dan suara mereka diabaikan. Meskipun ada beberapa upaya untuk memberikan pendidikan kepada elit lokal, secara keseluruhan, sistem politik yang

diterapkan cenderung mengekang kebebasan dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

### 3. Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Penjajahan Belanda

Perlawanan terhadap Belanda terjadi dalam berbagai bentuk, dari pemberontakan bersenjata hingga gerakan intelektual dan politik (Hurgronje, 2019; Maulany & Jelantik, 2023; Bella et al., 2024):

- **Pemberontakan Militer:** Salah satu contoh perlawanan bersenjata yang paling terkenal adalah Perang Aceh (1873-1904), yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dan Jenderal Teuku Umar. Perang ini merupakan upaya yang gigih untuk mempertahankan kedaulatan Aceh dari dominasi Belanda. Meskipun Aceh memiliki kekuatan militer yang cukup besar dan semangat juang yang tinggi, perlawanan ini berlangsung lama dan berakhir dengan kekalahan Aceh, tetapi tetap menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme.
- **Gerakan Politik:** Di bidang politik, munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk berjuang demi kemerdekaan dan hak-hak politik. Organisasi-organisasi ini berperan penting dalam menggalang dukungan dan menyebarkan ide-ide nasionalisme. Budi Utomo, sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional, berfokus pada pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Sarekat Islam berjuang untuk hak-hak ekonomi dan sosial umat Islam di Indonesia.
- **Aktivisme Sosial dan Budaya:** Perlawanan juga muncul melalui aktivisme sosial dan budaya. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan R.A. Kartini berjuang untuk hak-hak pendidikan dan kesetaraan gender. Ki Hajar Dewantara, misalnya, mendirikan Taman Siswa yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia, sementara R.A. Kartini memperjuangkan hak-hak perempuan dan pendidikan bagi kaum wanita. Keduanya berkontribusi dalam membangkitkan kesadaran sosial dan budaya sebagai bagian dari perjuangan melawan penjajahan.

Secara keseluruhan, perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda mencerminkan keragaman strategi dan pendekatan yang diambil oleh berbagai kelompok masyarakat, baik melalui kekuatan militer, gerakan politik, maupun aktivisme sosial. Setiap bentuk perlawanan ini berkontribusi pada proses panjang menuju kemerdekaan Indonesia.

## **Perjuangan Indonesia untuk Kemerdekaan**

### 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945

Syarifuddin (2024) menuliskan bahwa proklamasi ini terjadi dalam konteks kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945, Jepang mengalami tekanan besar dan akhirnya menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945. Dalam situasi kekosongan kekuasaan ini, para pemuda Indonesia mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.

Sebelum proklamasi, Soekarno dan Hatta melakukan pertemuan dengan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, pada 10 Agustus 1945. Dalam pertemuan tersebut, mereka diberitahu bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Namun, situasi ini memicu ketegangan antara pemimpin Indonesia dan pihak Jepang, yang ingin mempertahankan kontrol.

Pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menyatakan bahwa "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Setelah pembacaan, bendera Merah Putih dikibarkan oleh seorang anggota PETA, Latief Hendraningrat, dan lagu "Indonesia Raya" dinyanyikan oleh semua hadirin (Faudah, 2020). Teks proklamasi ini menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proklamasi ini tidak hanya menandai kemerdekaan Indonesia, tetapi juga menjadi dasar bagi pembentukan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Proklamasi ini kemudian menjadi momen bersejarah yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia.

## 2. Perjuangan Diplomatik dan Militer Indonesia untuk Mempertahankan Kemerdekaan

Setelah proklamasi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pengakuan internasional. Diplomasi menjadi salah satu alat penting dalam perjuangan ini (Nurbantoro et al., 2021). Delegasi Indonesia terlibat dalam berbagai perundingan dengan Belanda dan negara-negara lain untuk memperoleh pengakuan resmi atas kemerdekaan. Salah satu perundingan penting adalah Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 15 November 1946, di mana Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan permusuhan dan mengakui keberadaan Republik Indonesia sebagai bagian dari negara yang lebih besar, yaitu Negara Indonesia Serikat. Perjanjian ini juga mengatur agar kedua belah pihak berpartisipasi dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk membahas penyerahan kedaulatan Indonesia.

Perjuangan diplomatik ini juga melibatkan perundingan lain seperti Perundingan Renville dan Konferensi Meja Bundar, yang diadakan pada tahun 1949, di mana Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan penuh dari Belanda. Namun, proses ini tidak mudah dan sering kali diwarnai dengan ketegangan dan konflik, baik di dalam negeri maupun di arena internasional.

Di sisi militer, Indonesia mengalami konflik bersenjata yang signifikan dengan Belanda, terutama selama Agresi Militer Belanda I (1947) dan Agresi Militer Belanda II (1948). Agresi ini merupakan upaya Belanda untuk mengembalikan kekuasaan kolonialnya setelah proklamasi kemerdekaan (Husein, 2022). Pertempuran terjadi di berbagai daerah, termasuk Jawa, Sumatra, dan daerah-daerah lain, di mana pasukan Republik Indonesia melakukan perlawanan yang gigih meskipun dalam kondisi yang tidak seimbang.

Pasukan Indonesia, yang terdiri dari tentara reguler dan gerilyawan, menggunakan taktik perang gerilya untuk melawan kekuatan Belanda yang lebih terlatih dan dilengkapi dengan persenjataan modern. Meskipun mengalami banyak kesulitan, semangat juang rakyat Indonesia tetap tinggi, dan banyak pertempuran berlangsung dengan sengit, menunjukkan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan.

Secara keseluruhan, perjuangan diplomatik dan militer Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan merupakan bagian integral dari sejarah bangsa, mencerminkan kombinasi antara usaha politik dan ketahanan fisik dalam menghadapi tantangan dari kekuatan kolonial.

### **Hubungan Pasca-Kemerdekaan**

#### **1. Hubungan Diplomatik antara Indonesia dan Belanda setelah Kemerdekaan**

Setelah proklamasi, Belanda tidak segera mengakui kemerdekaan Indonesia dan malah melancarkan agresi militer, yang menyebabkan konflik bersenjata antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, Indonesia melakukan berbagai upaya diplomatik untuk mendapatkan pengakuan internasional dan menghentikan agresi militer Belanda. Salah satu langkah penting adalah melalui Perjanjian Linggarjati pada November 1946 (Ananda, 2022), di mana Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya mengakui kedaulatan.

Akhirnya, setelah serangkaian perundingan dan tekanan dari komunitas internasional, termasuk dari Amerika Serikat dan negara-negara lain, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Dalam perjanjian ini, Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia, menandai berakhirnya konflik diplomatik yang panjang dan menegaskan status Indonesia sebagai negara berdaulat.

#### **2. Perundingan Meja Bundar dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Bilateral**

Perundingan Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag pada 1949 merupakan titik balik penting dalam hubungan bilateral. KMB menyepakati transfer kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia dan menyelesaikan konflik pasca-kemerdekaan.

KMB menciptakan landasan bagi hubungan bilateral yang lebih stabil antara Indonesia dan Belanda (Ananda, 2022). Dengan adanya pengakuan kedaulatan, kedua negara dapat memulai kerjasama di berbagai bidang, meskipun hubungan ini tetap dipengaruhi oleh sejarah kolonial yang kompleks. KMB juga membuka jalan bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam forum internasional dan memperkuat posisinya di panggung dunia. Hasil dari KMB sangat signifikan, di antaranya:

- a. Pengakuan Kedaulatan: Belanda setuju untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) paling lambat pada 30 Desember 1949. Ini menandai pengakuan resmi Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia.
- b. Pembentukan RIS: KMB menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai negara serikat yang masih terikat dengan Belanda di bawah kepemimpinan Ratu Belanda. Meskipun demikian, RIS diakui sebagai negara berdaulat.
- c. Penyelesaian Masalah Irian Barat: Masalah Irian Barat (Papua) tidak diselesaikan dalam KMB. Kesepakatan dicapai bahwa status Irian Barat akan ditentukan dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan, yang menunjukkan bahwa isu ini tetap menjadi sumber ketegangan di kemudian hari

## **Rekonsiliasi, Dialog, dan Komitmen terhadap Nilai-Nilai Bersama**

### **1. Pentingnya Rekonsiliasi dan Dialog dalam Membangun Hubungan yang Lebih Baik**

Rekonsiliasi diperlukan untuk mengatasi ketegangan yang masih ada akibat sejarah penjajahan (Sunarimahingsih et al., 2018). Proses ini melibatkan pengakuan atas kesalahan masa lalu, yang dapat membantu membangun kepercayaan antara kedua negara. Dalam konteks Indonesia dan Belanda, rekonsiliasi dapat membantu mengurangi stigma negatif dan menciptakan ruang untuk kerjasama yang lebih konstruktif di berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Dialog terbuka tentang sejarah kolonial, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan, memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan memahami. Misalnya, diskusi mengenai dampak sosial dan ekonomi dari kolonialisme dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan memahami sejarah ini, masyarakat Belanda juga dapat lebih menghargai perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan mengembangkan identitasnya sebagai bangsa yang merdeka.

Melalui rekonsiliasi dan dialog, Indonesia dan Belanda dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kerjasama ini dapat mencakup proyek-proyek pembangunan, pertukaran budaya, dan inisiatif pendidikan yang dapat memperkuat hubungan bilateral. Dengan membangun hubungan yang lebih baik, kedua negara dapat berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Secara keseluruhan, rekonsiliasi dan dialog bukan hanya penting untuk menyembuhkan luka masa lalu, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi hubungan yang lebih baik di masa depan. Dengan mengatasi perbedaan dan membangun pemahaman, Indonesia dan Belanda dapat menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

### **2. Nilai-Nilai Bersama yang Dapat Menjadi Landasan untuk Membangun Hubungan yang Lebih Kuat dan Berkelanjutan**

Nilai-nilai bersama seperti perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan memainkan peran penting dalam membangun hubungan bilateral yang lebih kuat dan berkelanjutan antara Indonesia dan Belanda. Dengan menekankan nilai-nilai ini, kedua negara dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan melalui kerjasama di berbagai bidang.

Perdamaian adalah fondasi utama dalam hubungan internasional (Hadiwinata, 2017). Indonesia dan Belanda dapat bekerja sama untuk mempromosikan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan Eropa, serta berkontribusi pada upaya perdamaian global. Kerjasama dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum-forum regional dapat memperkuat komitmen kedua negara terhadap perdamaian.

Keadilan, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi, juga merupakan nilai yang penting. Kedua negara dapat berkolaborasi untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial bagi semua warga negara. Dengan berbagi pengalaman dan praktik terbaik, Indonesia dan Belanda dapat mengembangkan program-program yang mendukung keadilan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Nilai kemanusiaan mengajak kedua negara untuk berfokus pada isu-isu kemanusiaan global, seperti penanganan pengungsi, bantuan bencana, dan perubahan iklim. Kerjasama dalam proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat hubungan antara kedua negara. Misalnya, kolaborasi dalam inisiatif lingkungan hidup dan pengembangan energi terbarukan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Fokus pada kerjasama ekonomi juga penting. Indonesia dan Belanda dapat memanfaatkan potensi ekonomi masing-masing melalui investasi, perdagangan, dan pertukaran teknologi. Dengan menjalin kemitraan yang saling menguntungkan, kedua negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan memperkuat hubungan bilateral.

### 3. Contoh-Contoh Kegiatan yang Dapat Mempromosikan Rekonsiliasi, Dialog, dan Komitmen terhadap Nilai-Nilai Bersama

- a. Program Pendidikan dan Budaya: Program pertukaran pelajar antara Indonesia dan Belanda dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi budaya masing-masing negara. Melalui pengalaman langsung, pelajar dapat belajar tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang berbeda. Selain itu, seminar yang membahas isu-isu sosial, sejarah kolonial, dan kerjasama bilateral dapat menjadi platform untuk dialog terbuka. Pameran budaya yang menampilkan seni, musik, dan kuliner dari kedua negara juga dapat memperkuat hubungan antarbudaya dan meningkatkan rasa saling menghargai.
- b. Proyek Kerjasama Ekonomi: Kerjasama dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik, dapat memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda. Selain itu, kolaborasi di bidang kesehatan, seperti program vaksinasi dan penelitian kesehatan, dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Proyek-proyek ini tidak hanya menciptakan peluang ekonomi tetapi juga memperkuat komitmen kedua negara terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Dialog Sejarah dan Workshop: Mengadakan forum dan workshop yang membahas sejarah bersama dan dampaknya dapat membantu kedua belah pihak mengatasi masa lalu. Diskusi tentang pengalaman kolonial, dampaknya terhadap masyarakat, dan cara-cara untuk bergerak maju dapat membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik. Kegiatan ini juga dapat melibatkan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil untuk menciptakan dialog yang inklusif dan konstruktif.

## E. PENUTUP

Hubungan Indonesia-Belanda memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan. Memahami sejarah bangsa merupakan langkah penting untuk membangun hubungan yang konstruktif dan berkelanjutan. Rekonsiliasi, dialog, dan komitmen terhadap nilai-nilai bersama merupakan kunci utama untuk melangkah maju dan membangun masa depan yang lebih baik bagi kedua negara.

Penelitian ini telah menjelaskan dinamika hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda yang dipengaruhi oleh sejarah panjang kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan upaya rekonsiliasi. Melalui analisis yang mendalam, ditemukan bahwa pemahaman sejarah berperan penting dalam membentuk kebijakan diplomatik kedua negara. Faktor pendukung dalam hubungan ini meliputi adanya kesadaran akan pentingnya rekonsiliasi dan kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi dan pendidikan. Namun, terdapat juga faktor penghambat, seperti ketegangan yang masih tersisa akibat luka sejarah dan perbedaan persepsi mengenai masa lalu.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F., Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Daely, V. G., & Yunita, S. (2024). Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 24402–24407.
- Alkhaerat, M., AJ, A. A., & Garim, I. (2024). New Historicism Greenblatt dalam Novel Kartini Karya Abidah El Khalieqy dan Novel Buya Hamka Karya Ahmad Fuadi dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Materi Apresiasi Novel di SMA. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(3), 2605–2615.
- Ananda, D. (2022). *Perjuangan Diplomasi Indonesia*.
- Azra, F. A. Z., Yudhianti, O., & Chrisworo, O. P. (2024). Perbandingan Aksi, Reaksi, Dan Hubungan Internasional Berbagai Negara Terhadap Konflik Muslim Ronghya-Myanmar Dan Muslim Palestina-Israel. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(10), 71–80.
- Bella, S., Sembiring, M. E., & Sinaga, R. (2024). The Growth of Political Organizations During the Dutch Colonial Period. *Holistic Science*, 4(1), 109–114.
- Bilad, E., & Zakarias, C. (2012). Konstruktivisme Hubungan Internasional: Meretas Jalan Damai Perdebatan Antarparadigma. *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, 1(2), 131993.
- Carlsnaes, W., Thomas Risse, B. A. S., Baehaqie, I., & Rizal, M. (2021). *Kebijakan Luar Negeri: Handbook Hubungan Internasional*. Nusamedia.
- Fakhriansyah, M., & Patoni, I. R. P. (2019). Akses pendidikan bagi pribumi pada periode etis (1901-1930). *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2), 122–147.
- Faudah, I. S. (2020). *Modul pembelajaran SMA sejarah kelas XI: pemikiran dalam piagam PBB dan proklamasi kemerdekaan Indonesia*.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hurgronje, C. S. (2019). *Orang Aceh: Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial* (Vol. 1). IRCiSoD.
- Husein, H. (2022). Konflik Indonesia-Belanda: Upaya Mengembalikan Irian Jaya Kedalam Pangkuan Ibu Pertiwi. *WIKSA: Prosiding Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI*, 1(1).
- Imam, M. (2024). MM DEKOLONISASI: Dekolonisasi. *Jurnal Studia Administrasi*,

6(1), 18–29.

- Khaldun, I. (2021). Politik Diplomasi Masa Revolusi Menuju Pengakuan Kemerdekaan Indonesia (1946-1949). *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 122–131.
- Liliweri, A. (2019). *Pengantar studi kebudayaan*. Nusamedia.
- Maulany, N. N., & Jelantik, S. K. (2023). Komunikasi Politik Dalam Konteks Sejarah. *Samvada: Jurnal Riset Komunikasi, Media, Dan Public Relation*, 2(2), 151–163.
- Nuralia, L. (2017). Struktur Sosial pada Rumah Pejabat Tinggi Perkebunan Zaman Hindia Belanda di Jawa Bagian Barat. *Kapata Arkeologi*, 13(1), 1–20.
- Nurbantoro, E., Midhio, I. W., Risman, H., Prakoso, L. Y., & Widjayanto, J. (2021). Perang Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) dalam perspektif strategi perang semesta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10520–10530.
- Pamungkas, B. S. A. (2014). *Perbandingan koloni Vereenigde Oost-Indische Compagnie di Batavia dengan di Cape Town (1652-1799)*.
- Rochjati, R., & Putri, F. (2019). *e-Modul sejarah Indonesia kelas XI: penjelajahan bangsa barat ke Nusantara*.
- Rosyidin, M. (2016). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. *Global & Strategis*, 10(1), 55–73.
- Salma, R., Dewi, R., Wulandari, L., & Putra, P. (2023). Pengaruh Politik Etis Kolonial Belanda Terhadap Pertanian dan Ekonomi Lokal di Lampung. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6(2), 21–34.
- Santoso, D. (2014). Politik Hukum Pemerintah Kolonial Terhadap Peradilan Agama. *NIZAM*, 4(1).
- Sari, H. T. W., & Wiranata, I. H. (2024). Pendidikan HAM: Kegagalan Dunia Internasional dalam Mencegah Genosida di Rwanda 1994. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains Dan Pembelajaran*, 3(1), 352–358.
- Sunarimahingsih, Y. T., Dewi, Y. T. N., & Nurhayati, B. R. (2018). *Membangun Perdamaian di Ruang Publik Ambon*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Syarifuddin, K. F., Sidabutar, S. G., & Anwar, S. (2024). Pengaruh Jepang Dalam Perang Dunia II Terhadap Kemerdekaan Indonesia Dan Bidang Pertahanan. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 3(1), 46–56.
- Taum, Y. Y. (2020). *Sastra dan politik representasi tragedi 1965 dalam negara orde baru*. Sanata Dharma University Press.